



KKP
2025
#RISETOGETHER

LAPORAN KINERJA DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

TRIWULAN III
TAHUN 2025



DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Direktur Ikan Air Laut



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Ikhsan Kamil, S.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	11
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2025 Budidaya	16
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025	16
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2. Analisis Capaian Kinerja Ikan Air Laut	21
SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	21
IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT .	21
IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT	23
IKSK 3. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	25
IKSK 4. Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	28
IKSK 5. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT	29
IKSK 6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut Yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB).....	31
IKSK 7. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	34
IKSK 8. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji	37
IKSK 9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	38
IKSK 10. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	40
IKSK 11. Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) Yang Diuji	42
IKSK 12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	45
IKSK 13. Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.....	46

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	48
IKSK 14. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	48
IKSK 15. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	50
IKSK 16. Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	55
IKSK 17. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut	56
IKSK 18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.	58
IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	60
IKSK 20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	61
BAB IV. PENUTUP	64
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	12
Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang Pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	13
Gambar 3. Potensi Perikanan Budi Daya.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	17
Gambar 5. <i>Screenshoot</i> NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerja Triwulan III Tahun 2025	18
Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan III 2025.....	64

D A F T A R T A B E L

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	19
Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT	21
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional pada tiap UPT	22
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT .	24
Tabel 5. Capaian Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat.....	26
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat	27
Tabel 7. Capaian Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat.....	28
Tabel 8. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang Diproduksi untuk Operasional UPT	30
Tabel 9. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang Dibina Penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB).....	32
Tabel 10. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	35
Tabel 11. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan III Tahun 2025	36
Tabel 12. Target dan Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan III Tahun 2025	36
Tabel 13. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji	37
Tabel 14. Rincian Target Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025.....	39
Tabel 15. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	39
Tabel 16. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	41
Tabel 17. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji di BPKIL Serang Triwulan III Tahun 2025.....	42
Tabel 18. Capaian Sampel Surveilans <i>Anti Microbial Resistance</i> (AMR) yang Diuji	43
Tabel 19. Rincian Target dan Realisasi Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Triwulan III Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB	43
Tabel 20. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	46
Tabel 21. Capaian Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.....	47
Tabel 22. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	49

Tabel 23. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut	54
Tabel 24. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	55
Tabel 25. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut.....	56
Tabel 26. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan III Tahun 2025	57
Tabel 27. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	58
Tabel 28. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	61
Tabel 29. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Triwulan III Tahun 2025, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025:

- a) Terdapat 9 (sembilan) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya telah melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut, dengan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu: (i) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (Ekor), (ii) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor), (iii) Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat (Ekor), (iv) Sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji (Sampel), (v) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel), (vi) Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel), (vii) Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (Sampel) dan (viii) Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (Kg).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: (i) Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen).

- b) Terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya belum dapat diukur pada triwulan III, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (i) Produksi Calon Induk Kepiting untuk operasional UPT (Ekor), (ii) Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB, CPIB) (Unit), (iii) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan), (iv) Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang) dan (v) Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan.

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu : (i) Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai), (ii) Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (iii) Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (iv) Nilai

pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) (v) Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen) dan (vi) Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut.

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 45% Indikator Kinerja telah melampaui dan mencapai target triwulan yang ditetapkan dan 55% Indikator Kinerja yang capaiannya belum dapat diukur pada Triwulan III. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “Istimewa” dengan nilai **116,74**. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 4.552 ekor di BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPIUUK Karangasem;
2. **IKU 3. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih ikan air laut sebanyak 1.344.350 ekor oleh beberapa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu: BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPIUUK Karangasem, BPBAP Takalar dan BPBL Batam;
3. **IKU 4. Benih Kepiting Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih kepiting sebanyak 125.000 ekor oleh BPBAP Takalar;
4. **IKU 5. Pakan Ikan Air Laut Yang Diproduksi untuk Operasional UPT (Kg)**, telah diproduksi pakan ikan air laut untuk operasional UPT sebanyak 4.170 Kg oleh BBPBL Lampung;
5. **IKU 7. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)**, telah dilakukan pelayanan pengujian parameter penyakit ikan air laut sebanyak 5.467 sampel di beberapa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
6. **IKU 8. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel pakan ikan air laut sebanyak 25 sampel di BBPBL Lampung;
7. **IKU 10. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel parameter penyakit ikan air laut sebanyak 99 sampel di BPKIL Serang;
8. **IKU 11. Sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel Surveilans *Anti Microbial Resistance* (AMR) sebanyak 80 sampel di beberapa laboratorium UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon dan BPBL Batam;
9. **IKM 17. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap temuan dan saran dari LHP Itjen oleh

Satker Direktorat Ikan Air Laut pada periode triwulan III Tahun 2025 sehingga mendapatkan capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan sebesar 100%.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2025, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

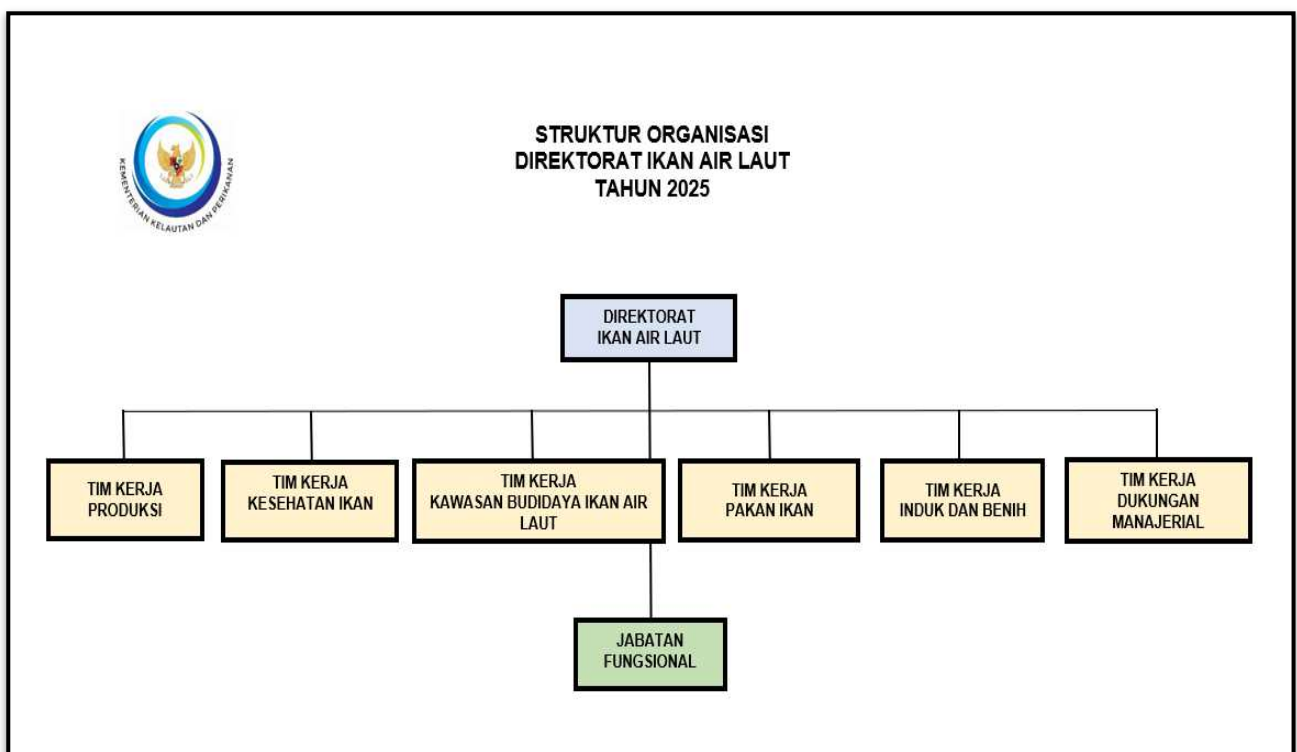
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama Triwulan III tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

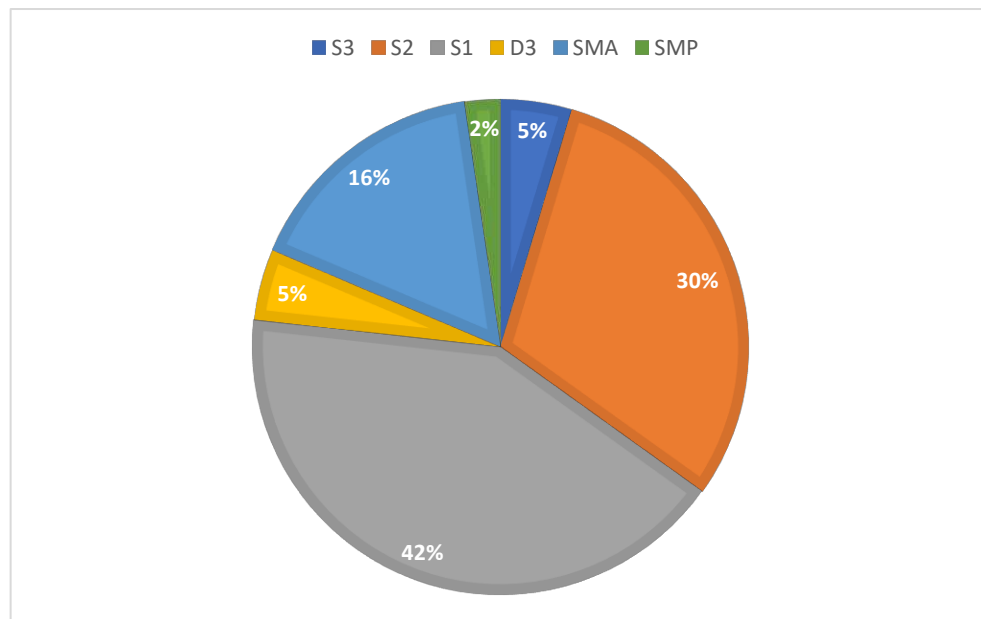
- 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 5%, S2 sebanyak 30%, S1 sebanyak 42%, D3 sebanyak 5%, SMA sebanyak 16% dan SMP sebanyak 2%.



Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 48 orang, dengan rincian sebagai berikut:

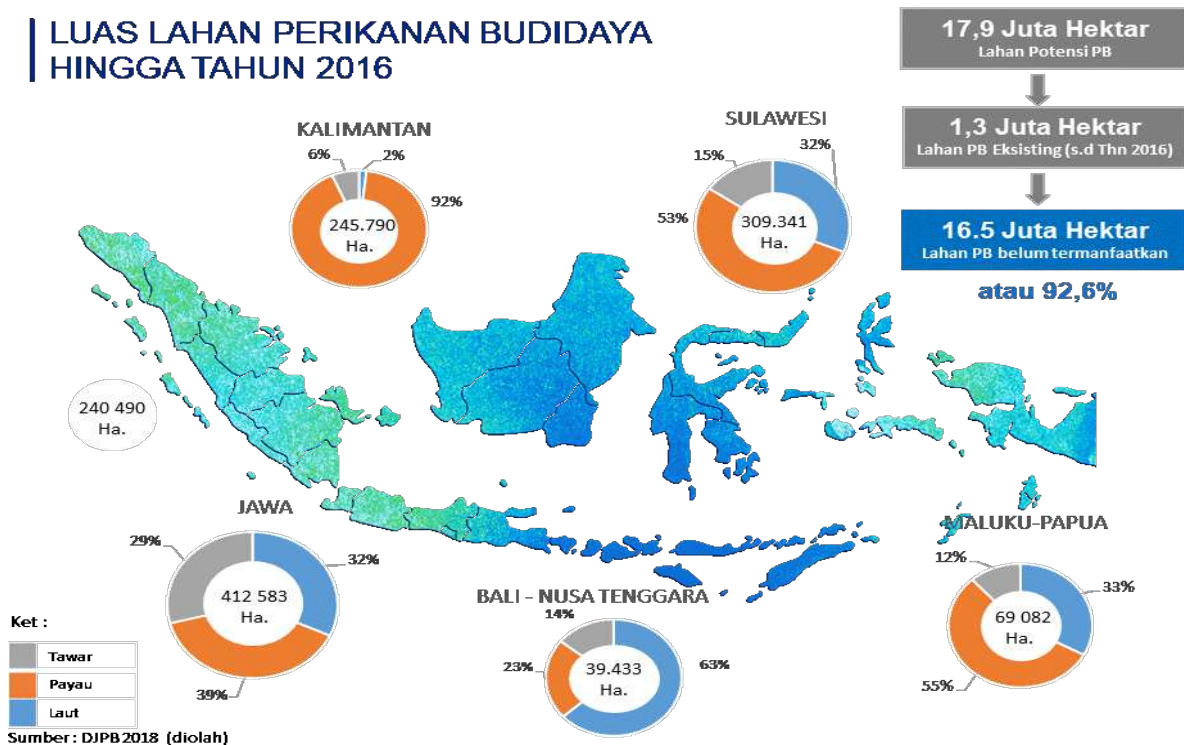
- Pegawai Negeri Sipil 34 orang,
- Pegawai PPPK 4 orang dan
- Pegawai Tenaga Kontrak 5 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Ikan Air Laut tersebar di Timja Dukungan Manajerial sebanyak 4 (empat) orang dan Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut 1 (satu) orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen

untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 3. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara budidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat

pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 selama kurun waktu Juli - September 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III tahun 2025. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025. Sasaran Kegiatan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 adalah Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Kamil
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  Ditandatangani Secara Elektronik Tb. Haeru Rahayu	Pihak Pertama Direktur Ikan Air Laut  Ditandatangani Secara Elektronik Ikhsan Kamil
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037
		2. Produksi Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89
		3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489
		4. Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574
		5. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927
		6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CPIB, CBIB) (Unit)	16
		7. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976
		8. Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17
		9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6
		10. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70
		11. Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75
		12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000
		13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	14. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84
		15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100
		17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85
		18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70
		20. Persentase Penyelesaian SOP Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	6.554.122.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	358.000.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025		6.912.122.000

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut

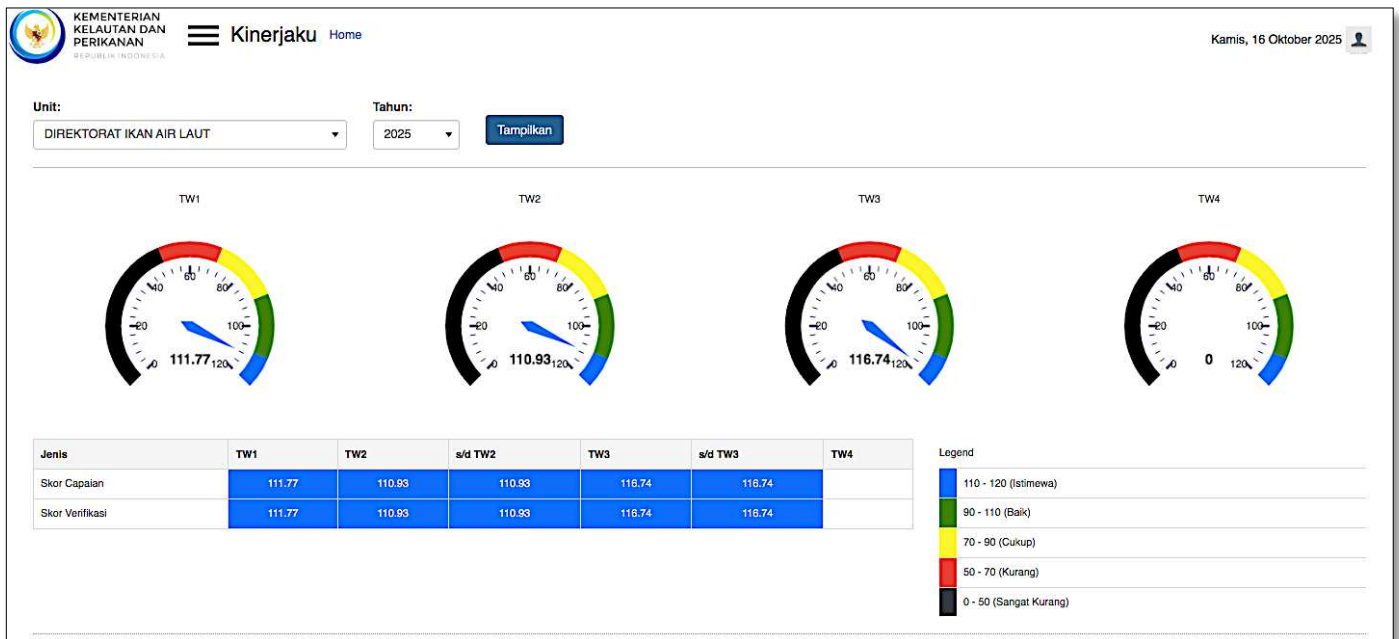

 Ditandatangani
Secara Elektronik
Tb. Haeru Rahayu


 Ditandatangani
Secara Elektronik
Ikhsan Kamil

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan III Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembudidayaan Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 10 (sepuluh) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 9 (sembilan) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW III	Realisasi TW III	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT (ekor)	10.037	Triwulan	2.787	4.552	163,3
		2) Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk operasional UPT (ekor)	89	Tahunan			
		3) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	1.774.489	Triwulan	564.400	1.344.350	238,2
		4) Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	174.574	Triwulan	122.201	125.000	102,3
		5) Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT (kg)	13.927	Triwulan	4.000	4.170	104,3
		6) Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) (Unit)	16	Tahunan			
		7) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (Sampel)	1.976	Triwulan	595	5.467	918,8

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Periode Pelaporan	Target TW III	Realisasi TW III	%
		8)	Sampel pakan ikan air laut yang diuji (Sampel)	17	Triwulan	5	25	500
		9)	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (Rekomendasi Kebijakan)	6	Tahunan			
		10)	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	70	Triwulan	20	99	495
		11)	Sampel monitoring surveilan AMR yang diuji (Sampel)	75	Triwulan	15	80	533,3
		12)	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	11.000	Tahunan			
		13)	Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan (Unit)	1	Tahunan			
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	14)	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84	Tahunan			
		15)	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81	Semesteran			
		16)	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	100	Tahunan			
		17)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85	Triwulan	85	100	117,7
		18)	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80	Tahunan			
		19)	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	70	Tahunan			
		20)	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	65	Tahunan			

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan budi daya yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 13 Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada indikator tersebut dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem. Produksi calon induk unggul ikan air laut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT lingkup DJPB.

Target indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 10.037 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	10.037	2.787	4.552	163,32	45,35

• Capaian Kinerja

Pada tabel diatas realisasi TW III pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT mencapai 4.552 ekor dari target TW III yakni 2.787 sedangkan pada target tahunan 10.037 ekor. Pada penghitungan realisasi TW III tersebut, capaian triwulan kedua pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut

untuk operasional UPT mencapai 163,32%, sedangkan mencapai 45,35% pada target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi dan capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional masing-masing UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi dan capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional pada tiap UPT

No	Nama UPT	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	1.351	0	0
2	BPBAP Situbondo	4.453	0	0
3	BPBAP Ujung Batte	199	0	0
4	BPBL Ambon	1.142	1.158	101,40
5	BPBL Batam	1.820	2.206	121,20
6	BPBL Lombok	948	848	89,45
7	BPIUUK Karangasem	124	340	274,19
Total		10.037	4.552	45,35

Berdasarkan tabel tersebut, capaian produksi calon induk unggul ikan air laut tertinggi dicapai oleh BPIUUK Karangasem dengan persentase capaian sebesar 274,19%, diikuti oleh BPBL Batam (121,20%), BPBL Ambon (101,40%) dan BPBL Lombok (89,45%). Sementara itu, BBPBL Lampung, BPBAP Situbondo dan BPBAP Ujung Batee belum melaporkan realisasi produksi karena target pelaksanaan bersifat tahunan dan akan disampaikan pada akhir tahun. Perbedaan capaian antar UPT disebabkan oleh variasi dalam tata kelola budi daya, jenis komoditas yang dikembangkan, serta teknis penanganan calon induk di masing-masing satuan kerja. Setiap komoditas ikan air laut memiliki karakteristik yang berbeda terhadap pertumbuhan, kebutuhan pakan dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan perairan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan produksi calon induk unggul ikan air laut antara lain adalah adanya perbedaan karakteristik komoditas antar UPT yang memengaruhi jumlah calon induk yang dihasilkan, keterbatasan sarana dan prasarana produksi serta perbedaan jadwal siklus budi daya antar unit kerja. Selain itu, beberapa UPT memiliki jadwal produksi tahunan sehingga capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Untuk menunjang keberlanjutan dan peningkatan produksi calon induk ikan air laut yang unggul, disarankan agar setiap UPT melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) budidaya induk secara konsisten. Penerapan SOP yang baik akan membantu proses monitoring performa pertumbuhan dan kesehatan calon induk, sekaligus menjamin mutu hasil produksi.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan kualitas calon induk unggul ikan air laut, antara lain perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan biosecurity secara optimal di seluruh fasilitas budi daya.
- 2) Pengelolaan pakan secara tepat (ukuran, jumlah, dan frekuensi) dengan memperhatikan kandungan nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis komoditas yang dikembangkan.
- 3) Peningkatan penerapan prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) di seluruh kegiatan budi daya yang dilaksanakan di UPT.
- 4) Peningkatan kapasitas produksi benih unggul melalui seleksi yang ketat terhadap calon induk sesuai dengan peraturan/standar operasional yang berlaku.
- 5) Penguatan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang efisiensi dan kualitas hasil.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW III pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp130.704.000 (35,82%) dari pagu Rp 364.794.000
- BPBAP Situbondo: Rp51.970.000 (82,17%) dari pagu Rp 63.244.000
- BPBAP Ujung Batee: Rp0 (0%) dari pagu Rp 53.730.000
- BPBL Ambon: Rp305.968.000 (100%) dari pagu Rp 305.968.000
- BPBL Batam: Rp302.034.566 (78,45%) dari pagu Rp 385.000.000
- BPBL Lombok: Rp94.915.000 (37,08%) dari pagu Rp 255.960.000
- BPIUUK Karangasem: Rp1.350.000 (45%) dari pagu Rp 3.000.000

IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT merupakan salah satu kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang bertanggungjawab pada pelaksanaan indikator tersebut adalah BBPBAP Jepara. Produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul kepiting yang dapat menghasilkan benih bermutu pada operasional UPT tersebut.

Target indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT lingkup DJPB pada tahun 2025 yaitu 89 ekor, dimana pada TW III tidak ada target dan dilakukan pengukuran capaian indikator dilakukan pada akhir tahun. Capaian indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	89	-	-	-	-

Pada tabel diatas diketahui TW III pada indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT belum ada capaian, hal tersebut dikarenakan kepiting dalam proses pemeliharaan di tambak. Pendederan crablet sebanyak 13.248 ekor dengan ukuran lebar karapas 0,5 cm 0,01 gram. Pemeliharaan selama 110 hari mencapai ukuran dengan lebar rata-rata karapas 8,5 cm dengan berat rata-rata 87,5 gram.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT di Timja Induk dan Benih Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi pada kegiatan produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT belum ada capaian karena masih dalam proses pemeliharaan calon induk kepiting. Permasalahan yang dihadapi adalah kanibalisme, sehingga diduga tingkat kelulushidupannya masih relatif rendah.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi pada kegiatan produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT bertujuan untuk menunjang keberlanjutan produksi calon induk kepiting yang unggul, sehingga diperlukan ketersediaan calon induk kepiting yang berkualitas tinggi, sehat, adaptif terhadap lingkungan budi daya. Hal tersebut dapat

dilaksanakan antara lain dengan penerapan standar operasional prosedur budidaya induk sehingga dapat memonitoring performa pertumbuhan dan pemeliharaan calon induk kepiting di tambak.

Tindak lanjut yang dilakukan pada Timja Induk dan Benih yaitu mengumpulkan data terkait kegiatan calon induk unggul kepiting pada BBPBAP Jepara. Rencana tindak lanjut di tambak dalam rangka meminimalisir kenibalisme adalah dengan selalu memenuhi kebutuhan pakan alaminya berupa kerang coklat dan udang-udangan (jambret). Selain itu juga melakukan pengamatan pertumbuhan kepiting dan menjaga kondisi kualitas air tetap baik. Pertumbuhan calon induk kepiting, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran awal, pakan, dan kondisi lingkungan pemeliharaan. Pemberian pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan kepiting akan mempengaruhi pertumbuhan optimal pada budi daya kepiting. Kondisi lingkungan pemeliharaan seperti kualitas air, suhu, dan salinitas juga berpengaruh pada pertumbuhan kepiting. Kepiting yang dipelihara dalam kondisi yang optimal akan tumbuh lebih cepat.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW III pada indikator produksi calon induk unggul kepiting untuk operasional UPT mencapai Rp 2.365.000 (71,03%) dari pagu Rp 3.330.000.

IKSK 3. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator jumlah benih ikan air laut yang direncanakan untuk disalurkan ke masyarakat, yang berhasil disalurkan secara aktual. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penyaluran benih ikan air laut dalam mendukung pembudidayaan ikan oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh operasional UPT lingkup DJPB yang terdiri dari BBPBL Lampung, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batte, BPBL Ambon, BPBL Batam, BPBL Lombok, dan BPIUUK Karangasem.

Target indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 1.774.489 ekor. Kriteria pelaksanaan kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat tertuang dalam Kepdirjend Perikanan Budi Daya no 311 beserta perubahannya tentang petunjuk teknis bantuan benih ikan lingkup UPT DJPB tahun 2025. Target indikator bantuan benih ikan air laut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan. Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Capaian Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	1.774.489	564.400	1.344.350	238,2	76

Pada tabel diatas realisasi TW III pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah terlaksana dengan baik dimana realisasi sudah mencapai 1,344,350 ekor dari target tahun 2025 dengan jumlah 1,774,489 ekor. Pada penghitungan realisasi TW III tersebut, capaian triwulan ketiga pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 76% dari target tahunan dan sebesar 238,2% dibandingkan dengan target triwulan. Pada data diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada triwulan III satker BPBAP Ujung Bate memiliki persentase capaian tertinggi diantara satker lain, sedangkan presentase terendah pada satker BPBL Ambon. Perbedaan target dan nilai realisasi bantuan benih ikan air laut disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja Prasarana dan Sarana Kawasan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Target indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 1.774.489 ekor. Kriteria pelaksanaan kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat tertuang dalam Kepdirjend Perikanan Budi Daya no 311 beserta perubahannya tentang petunjuk teknis bantuan benih ikan lingkup UPT DJPB tahun 2025. Target indikator bantuan benih ikan air laut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB. Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 6. Realisasi dan capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Nama UPT	Target 2025	Capaian Volume TW II	Capaian (%)
1	BBPBL Lampung	515.495	390.900	76
2	BPBAP Takalar	19.073	19.400	28,31
3	BPBAP Ujung Bate	84.586	190.650	225
4	BPBL Ambon	423.586	213.500	50
5	BPBL Batam	384.261	225.000	59
6	BPBL Lombok	269.531	230.900	76
7	BPIUUK Karangasem	77.957	101.000	130
Total		1.774.489	1.344.350	76

Pada tabel diatas realisasi TW III pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah terlaksana dengan baik dimana realisasi sudah mencapai 1,344,350 ekor dari target tahun 2025 dengan jumlah 1,774,489 ekor. Pada penghitungan realisasi TW III tersebut, capaian triwulan ketiga pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 76% dari target tahunan. Pada data diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada triwulan III satker BPBAP Ujung Bate memiliki persentase capaian tertinggi diantara satker lain, sedangkan presentase terendah pada sakter BPBL Ambon. Perbedaan target dan nilai realisasi bantuan benih ikan air laut disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Untuk periode tahun anggaran 2025, target sudah terlampaui sehingga dari segi capaian sudah tidak ada permasalahan dalam proses penyaluran bantuan benih ikan. Pada proses budidaya benih ikan air laut terkendala hasil produksi benih yang dihasilkan tidak optimal. Selain itu juga dari segi teknis sarana perbenihan butuh adanya perbaikan perbaikan bak pemeliharaan dan tandon air sehingga kedepannya produksi dapat dimaksimalkan.

• **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi pada kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat yakni berfokus pada perbaikan/pemulihan kualitas induk ikan dan produksi pakan alami untuk mensupport kegiatan yang lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi antar tim kerja guna memastikan hasil produksi yang lebih optimal.

Tindak lanjut yang dilakukan pada Timja Induk dan Benih yaitu mengumpulkan data terkait kegiatan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing UPT. Tindak lanjut di tempat budi daya yakni tetap melakukan produksi benih sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menyalurkan bantuan benih berdasarkan usulan masyarakat sesuai petunjuk teknis yang sudah ditetapkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Capaian anggaran TW III pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai Rp 4,900,472,851 (80.14%) dari pagu anggaran Rp 6,114,655,000.

IKSK 4. Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Indikator Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat adalah bantuan pemerintah dengan perhitungan jumlah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sesuai dengan kelompok penerima yang sudah ditetapkan. Kepiting merupakan salah satu komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis tinggi. Indikator benih kepiting yang disalurkan kepada masyarakat digunakan dalam efektifitas dan efisiensi penyaluran benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dalam mendukung pembudidayaan kepiting oleh masyarakat. Pada indikator ini dilaksanakan oleh BPBAP Takalar sebagai penanggungjawab pelaksana bantuan.

Target indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2025 yaitu 174.574 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2025 sesuai dengan target BPBAP Takalar.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Capaian Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	174.574	122.201	125.000	102,29	71,60

Pada tabel diatas realisasi TW III pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik yakni mencapai 125.000 ekor dari target TW III 122.201 ekor. Pada penghitungan persentase realisasi TW III tersebut, capaian triwulan III pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 102,29%, sedangkan capaian mencapai 71,60% pada target tahunan. Data penerima bantuan benih kepiting ada triwulan ini yaitu 2 kelompok yakni Perairan Mappakalombo dan Nikarannuang dengan ukuran benih 2-3 cm.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat merupakan indikator baru pada Timja induk dan benih pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi atas kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan III sudah dilaksanakan dengan baik, dimana persentase capaian mencapai 102,29% pada target triwulan III.

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat yaitu:

- Sulitnya memperoleh induk rajungan/kepiting yang ukurannya sesuai dengan SNI sehingga hasil larva yang dihasilkan kurang maksimal baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas larva; dan
- Fluktuasi suhu yang tinggi selama periode triwulan III menyebabkan beberapa kali larva mengalami gagal molting.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi pada kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pakan alami terutama rorifer untuk mendukung produksi benih rajungan; dan
- Memperbaiki kualitas air pemeliharaan rajungan untuk mendukung produksi benih.

Tindak lanjut pada kegiatan benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat yaitu:

- Untuk mengantisipasi sulitnya induk alam yang sesuai dengan SNI maka tim produksi benih kepiting mencoba memelihara rajungan untuk calon induk di Soliter Sibiru dan bak tandon; dan
- Fluktuasi suhu diantisipasi dengan menutup bak larva pemeliharaan pada malam hari dengan plastik HDPE.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Capaian anggaran pada TW III pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp 98.351.700 (73,08%) dari pagu anggaran Rp 134.574.000.

IKSK 5. Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan berkembang biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: 1) pakan ikan terapung; 2) pakan ikan melayang; dan 3) pakan

ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: (1) cair; (2) pasta; (3) tepung; (4) kapsul; (5) remah; dan (6) pellet.

Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria:

- disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah;
- penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan
- formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh UPT DJPB yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi.

Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan salah satu program dari DJPB untuk memproduksi secara mandiri pakan ikan yang akan dimanfaatkan oleh UPT itu tersebut. Satker yang melaksanakan indikator tersebut yaitu BBPBL Lampung. Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh satker untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya ikan air laut. Indikator diukur guna mengoptimalkan unit produksi pakan ikan air laut, memaksimalkan penggunaan bahan baku pakan ikan yang tersedia dan menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi.

• Capaian Kinerja

Target tahun 2025 pada indikator ini yaitu 13.927 kg dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW II	Terhadap target tahunan
-	-	13.927	4.000	4.170	104,25	29,94

Pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT dalam hal ini BBPBL Lampung pada TW III ini telah mencapai 4.170 kg dengan presentase capaian terhadap TW III 104,25% dan 29,94% terhadap capaian tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pakan ikan air laut yang diproduksi BBPBL Lampung sudah memenuhi target pada TW III ini. Namun, capaian hingga TW III ini masih jauh dari target tahunan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu proses menyusun rencana pengadaan bahan baku dan persiapan mesin pakan untuk produksi pakan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap di TW III pada produksi pakan untuk operasional UPT di BBPBL Lampung mencapai Rp. 85.074.550 atau 46,77% dari pagu Rp 181.900.000.

IKSK 6. Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari :

- 1) Pembinaan CBIB adalah pembinaan cara budidaya ikan yang baik untuk unit budi daya ikan air laut agar hasil produksi perikanan budidayanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke sistem OSS. Pada saat ini, penerapan CBIB bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Pembinaan CPIB adalah pembinaan cara pembenihan ikan yang baik yang dilakukan terhadap seluruh unit budi daya ikan air laut yang memproduksi benih ikan sehingga induk dan benih yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Pembinaan CBIB dan CPIB pada unit budidaya ikan air laut dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sedangkan sertifikasi CBIB dan CPIB dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Direktorat Ikan Air Laut dalam mendukung peningkatan mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan usaha perikanan budi daya. Tim pelaksana kegiatan adalah Tim Kerja Produksi, Direktorat Ikan Air Laut. Indikator kinerja memiliki fokus pada upaya pembinaan penerapan prinsip-prinsip CPIB dan CBIB kepada pelaku

usaha ikan air laut dan lobster serta melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat penerapan prinsip-prinsip tersebut pada unit usaha pembenihan dan pembesaran agar kegiatan usaha budi daya laut dapat berlangsung secara berkelanjutan.

- **Capaian Kinerja**

Target tahunan Indikator kinerja Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) adalah sebanyak 16 (Unit) dan pada Triwulan III belum ada realisasi dikarenakan pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 9. Capaian Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	16	0	0	0	0

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa target indikator sudah tercapai dan terlampaui. Kegiatan pembinaan CPIB dan CBIB dilakukan sesuai dengan amanat dari Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya nomor 463 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Mutu Pembudidayaan Ikan. Berdasarkan Keputusan Dirjen tersebut, terdapat tahapan dan mekanisme yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan CPIB: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Fasilitasi dan Pemeriksaan Lapangan;
- 2) Pembinaan CBIB: Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Fasilitasi.

Selama tahun 2025, Direktorat Ikan Air Laut melakukan pembinaan CPIB dan CBIB dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi Daya yang terdekat dari kawasan yang memiliki potensi

budi daya air laut. Sosialisasi dilakukan secara *luring* dengan melibatkan unit pembenihan dan pembesaran yang berlokasi di sekitar UPT Ditjen Perikanan Budi Daya.

Pada triwulan ke 3, kegiatan pembinaan CPIB dan CBIB dilaksanakan pada 10–11 September 2025 di BPBAP Situbondo. Peserta terdiri atas 8 pelaku usaha pembenihan dan 8 pelaku usaha pembesaran dari wilayah Kabupaten Situbondo, serta perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Materi yang disampaikan meliputi: (1) Kebijakan pemerintah dalam penerapan CPIB dan CBIB; (2) Prinsip teknis pembenihan ikan laut dan lobster (CPIB); dan (3) Prinsip teknis budi daya ikan laut dan lobster (CBIB). Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapang ke unit usaha UD. Benur Jumbo dan UD. Berkah Kerapu (HSRT – pembenihan kerapu cantang), serta UD. Samudra Berkah Abadi (pembesaran pada KJA dengan komoditas kerapu, kakap merah, dan bandeng). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menerapkan prinsip CPIB dan CBIB secara konsisten, khususnya dalam hal sanitasi, manajemen kualitas air dan pengelolaan pakan.

Dari sisi manajemen kegiatan, pembinaan CPIB dan CBIB untuk komoditas ikan air laut dan lobster dipandang kurang efektif jika dilakukan secara daring. Untuk itu, sampai dengan triwulan ke III tahun 2025, kegiatan pembinaan dilakukan secara *luring* dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Sementara permasalahan dari sisi teknis yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Pelaku usaha mengalami kendala dalam pemenuhan dokumen perizinan berusaha (PKKPRL) dan membutuhkan pendampingan dari Ditjen Perikanan Budi Daya dan Dinas setempat.
 - Unit pembenihan skala kecil mengalami kesulitan dalam memenuhi standar IPAL sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 1 Tahun 2025.
 - Sulitnya memperoleh telur ikan kerapu menyebabkan gangguan kontinuitas produksi.
 - Harga pakan dan bahan input lainnya menjadi beban biaya utama.
 - Serangan penyakit pada fase pembesaran menurunkan survival rate (SR) dan nilai jual produk.
 - Pelaku usaha membutuhkan pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) untuk mendukung sertifikasi CPIB.
- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Menyikapi kendala yang terjadi di sisi manajerial, maka rekomendasi yang diberikan adalah perlu dilakukan penyesuaian anggaran agar pembinaan CPIB

dan CBIB dapat menyentuh semua lokasi yang memiliki potensi budi daya ikan air laut. Sementara dari sisi teknis, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan:

- Direktorat Ikan Air Laut dipandang perlu melakukan fasilitasi untuk pendampingan penyusunan dokumen perizinan berusaha: PKKPRL bagi pelaku usaha. Hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan Ditjen terkait.
- Mendorong penyusunan pedoman teknis IPAL sederhana yang dapat diterapkan oleh HSRT dengan lahan terbatas.
- Mengusulkan kegiatan pelatihan Manajer Pengendali Mutu (MPM) untuk unit pembenihan ikan laut.
- Melakukan koordinasi dengan Ditjen Teknis lain dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses bahan baku (benih dan calon induk).
- Melanjutkan pembinaan rutin dan monitoring lapangan terhadap unit yang telah menerapkan CPIB dan CBIB.

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Program dan Kerjasama terkait dengan penyesuaian target dan anggaran kegiatan tahun 2026;
- Penyusunan jadwal dan rencana teknis pelatihan MPM pada tahun anggaran berikutnya berkoordinasi dengan Direktorat pengampu (Focal Point).
- Pemetaan unit usaha yang siap untuk sertifikasi CPIB/CBIB dan pendampingan administratif dengan menyampaikan surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki potensi budi daya ikan air laut.
- Koordinasi lintas instansi (KKP, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten) untuk penanganan isu perizinan dan IPAL.
- Dokumentasi kegiatan dan penyusunan laporan hasil pembinaan sebagai dasar perencanaan rencana aksi lanjutan tahun 2026.
- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Capaian anggaran pada TW III pada Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) sebesar Rp 45.920.847 (97,87%) dari pagu anggaran Rp 46.922.000.

IKSK 7. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium

kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh 4 UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 1.967 sampel dan pada triwulan III sebanyak 595 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok.

Tabel 10. Capaian Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	1.976	595	5.467	918,82	276.67

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi TW III, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 5.467 sampel atau mencapai 918,82%, terhadap target tw III sedangkan capaian tahunan mencapai 276,67% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan indikator baru pada Timja Kesehatan Ikan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan memiliki target tahunan sebesar 1.976 (Sampel) dan realisasi triwulan III sebesar 5.467 sampel yang berasal dari layanan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan di 4 UPT DJPB yang mencakup sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan III Tahun 2025

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian (%)
1	BPBL Batam	744	200	1.164	212,02
2	BBPBL Lampung	549	140	1.082	145,43
3	BPBL Lombok	374	136	2.693	720,05
4	BPBL Ambon	309	119	528	170,87
Jumlah :		1,976	595	3.645	5.467

Berdasarkan Tabel di atas, secara keseluruhan capaian layanan pengujian sampel laboratorium kesehatan ikan air Laut sampai dengan triwulan III sangat baik yakni mencapai 276,67%, nilai capaiannya berada di atas rata-rata capaian laboratorium di 15 UPT DJPB yang mencapai 247,45%. Capaian pengujian sampel tertinggi adalah laboratoirum BPBL Lombok mencapai 720,05%, diikuti BBPBL Lampung 212,02%, dan BPBL Ambon 170,87% dan BPBL Batam sebesar 145,43%. Capaian realisasi didominasi oleh besarnya jumlah pengujian kualitas air dan patologi di setiap UPT yang relatif tidak membutuhkan biaya pengujian yang besar karena hanya menggunakan alat.

Tabel 12. Target dan Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan III Tahun 2025.

No	Ruang Lingkup Pengujian	Target	Realisasi sampai Triwulan III	Prosentase (%)
1	Kualitas Air	1.314	3.770	286,91
2	Mikrobiologi	324	683	210,80
3	Biomolekular	196	470	239,80
4	Patologi	88	542	615,91
5	Residu	54	2	3,70
Total		1.976	5.467	276,67

Berdasarkan ruang lingkup pengujian realisasi layanan pengujian sampel laboratorium kesehatan ikan air laut sampai triwulan III untuk kualitas air sebesar 3.770 sampel, mikrobiologi 683 sampel, biologi molekuler 470 sampel, patologi 542 sampel, dan residu 2 sampel (Tabel 12). Layanan pengujian didominasi oleh pengujian kualitas air, sedangkan ruang lingkup lainnya relatif sedikit. Capaian layanan sampel kesehatan ikan tertinggi dicapai oleh ruang lingkup patologi 615,91%, dan terendah dicapai oleh ruang lingkup pengujian residu sebesar 3,7%. Sedangkan untuk ruang lingkup kualitas air, mikrobiologi dan biomolekuler relatif rata yakni 286,91%, 210,80% dan 239,80%. Rendahnya capaian sampel residu disebabkan oleh kegiatan monitoring residu yang belum berjalan hingga triwulan III, sedangkan sampel pengujian residu di bidang air laut tidak ada.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target pada triwulan selanjutnya yaitu 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian sampel di masing-masing laboratorium dan 2) Melakukan proses buka blokir anggaran dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW III dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 135.018.670 (57%) dari pagu Rp. 236.600.000,-
- BPBL Batam sebesar Rp. 104.236.771 (60,76%) dari pagu Rp. 171.542.000,-
- BPBL Ambon sebesar Rp. 49.153.000 (49.98%) dari pagu Rp. 98.350.000,-
- BPBL Lombok sebesar Rp. 104.752.727 (72,45%) dari pagu Rp. 144.570.000,-

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan adalah sebesar Rp. 393.161.168,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 651.062.000,- atau mencapai 60,39% anggaran terserap.

IKSK 8. Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah pegujian nutrisi dan mutu pakan ikan. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofur, kloramfenikol, oksitertrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin. Indikator Sampel pakan ikan Air Laut yang diuji dilaksanakan oleh BBPBL Lampung.

- **Capaian Kinerja**

Indikator pakan ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 17 (Sampel) dan realisasi triwulan III sebanyak 25 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BBPBL Lampung yang dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Capaian Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Pakan Ikan Air Laut Yang Diuji				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	17	5	25	500	159

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi TW III, capaian sampel pakan ikan air laut yang diuji sebesar 500% terhadap target tw III sedangkan untuk capaian tahunan mencapai 159% terhadap target tahunan

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator sampel pakan ikan air laut yang diuji merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Sampel pakan yang diuji di BBPBL Lampung pada TW III ini mencapai 25 sampel. Realisasi sampel pakan yang diuji ini telah memenuhi target tahunan. Sampel pakan yang diuji berasal dari internal dan eksternal. Sampel internal yang diuji berupa bahan baku dan pelet yang diproduksi oleh pabrik pakan mandiri BBPBL Lampung. Sedangkan sampel pakan eksternal berasal dari pokdakan dan/atau stakeholder lainnya.

Target dari sampel pakan yang uji telah terpenuhi, namun terdapat beberapa permasalahan yaitu adanya beberapa alat pengujian pakan yang rusak.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Agar proses pengujian sampel pakan di BBPBL Lampung terus meningkat diperlukan perbaikan terhadap alat-alat yang rusak.

Target pengujian sampel di BBPBL Lampung sudah terpenuhi, namun demikian pengujian sampel pakan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan (masyarakat).

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap di TW III pada kegiatan sampel pakan yang diuji di Laboratorium BBPBL Lampung sebesar Rp. 6.044.000 atau 67,21% dari pagu Rp. 8.993.000.

IKSK 9. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. Rekomendasi Kebijakan di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu Kebijakan di bidang residu dan bidang penyakit ikan.

Target Rekomendasi Kebijakan yang akan dihasilkan pada Tahun 2025 sebanyak 6 (Rekomendasi Kebijakan). 6 rekomendasi kebijakan tersebut, yaitu: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan

dokumen RSNI bidang produksi dan kesehatan ikan. Target dan Realisasi Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Rincian Target Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Tahun 2025

No	Rekomendasi Kebijakan	Target	Produk
1	Bidang Kesehatan Ikan	3	- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (1), - Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2) dan
2	Bidang Pembudidayaan Ikan	3	- KLHS Budidaya Ikan Nila salin (1) - Road map budidaya Laut (1) - Juknis/SOP Budi Daya Laut (1)
	Total	6	

- Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut sebagaimana terlihat pada Tabel. 15.

Tabel 15. Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Capaian Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	6	-	-	-	-

- Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut tahun 2024.

- Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Penetapan kebijakan Tata Kelola bidang budi daya ikan air laut ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target ini didasarkan dari pentingnya penetapan Kebijakan tersebut dalam kegiatan Budi Daya.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Tata Kelola Bidang Budidaya Laut adalah belum terselesaikannya pembahasan Bersama dengan UPT terkait serta para pakar sehingga draft dokumen masih dalam tahap pembahasan dan review.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan UPT terkait serta para pakar.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mencapai target yaitu dengan melakukan koordinasi stakeholders terkait untuk menghasilkan draft kebijakan yang dibutuhkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran untuk menunjang tercapainya indikator tersebut dianggarkan sebanyak Rp. 987.237.000.- dan sudah terdapat realisasi anggaran sebesar Rp. 667.718.429,- atau sekitar 67,64% pada triwulan III.

IKSK 10. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Kegiatan monitoring penyakit ikan dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya wabah di kawasan perikanan budi daya yang berpotensi mengancam pencapaian target produksi dan menghambat kelancaran perdagangan produk perikanan budidaya di dunia internasional. Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan di 34 Provinsi dengan dukungan anggaran Tugas Pembantuan namun pada Tahun 2025, kegiatan ini didelegasikan di BPKIL Serang dengan target sampel monitoring ikan air laut sebanyak 70 sampel. Capaian IKK tersebut, hasil pengukurannya baru diketahui akhir tahun.

Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji merupakan sampel monitoring pasif dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan gejala penyakit yang ditemukan atau sesuai yang direncanakan/diminta bila tidak ada gejala penyakit. Sampel yang diambil tidak hanya terkait dengan komoditas ikan saja namun juga meliputi pakan, air dan sedimen yang juga dapat menjadi media pembawa penyakit ikan air payau. Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan.

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah sampel hasil kegiatan monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang dan diujikan di laboratorium. Target merupakan sampel hasil monitoring pada sentra-sentra budidaya ikan air laut yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 70 sampel dan pada triwulan III sebanyak 20 sampel yang berasal dari pengujian di laboratorium BPKIL Serang.

Tabel 16. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	70	20	99	495	141,43

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi TW III, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 99 sampel atau mencapai 495%, terhadap target tw III sedangkan capaian tahunan mencapai 141,43% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji pada tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji telah dilaksanakan pengujian pada 99 sampel di BPKIL Serang, sampel berasal dari sampel pada saat uji lapang. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja monitoring sangat baik, selain mampu melampaui target juga mampu memberikan layanan yang baik dalam upaya memonitor keberadaan penyakit di kawasan budi daya. Monitoring penyakit merupakan langkah antisipatif untuk mencegah kehadiran wabah penyakit yang bisa berdampak buruk dan merugikan pembudidaya. Evaluasi sampel monitoring penyakit ikan air laut yang ada pada sentra budi daya di 34 provinsi dengan ruang lingkup pengujian mikrobiologi yang meliputi total bakteri, total vibrio, dan identifikasi bakteri.

Kendala atas rencana aksi yang telah dilakukan adalah data yang disampaikan oleh BPKIL Serang masih berupa angka lempeng total (ALT) dan matrik yang diuji masih berupa air laut.

Tabel 17. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang Triwulan III Tahun 2025

No.	Laboratorium Pengujian UPT	Ruang Lingkup	Target Tahunan (Sampel)	Target TW III (Sampel)	Realisasi TW III (Sampel)
1	BPKIL Serang	Monitoring Penyakit Ikan Air Laut	70	20	99
TOTAL			70	20	99

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya yang diharapkan bisa dilaksanakan pada indikator Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji, yaitu 1) Laboratorium BPKIL Serang perlu menambah matrik pengujian seperti daging ikan dan/atau hewan laut lainnya dan diperlukan juga penambahan parameter pengujian selain angka lempeng total bakteri, parameter yang lebih fokus terhadap pengujian penyakit, 2) melakukan perencanaan kegiatan monitoring pada triwulan selanjutnya melibatkan pemerintah daerah (kolaborasi) dan 3) Memprioritaskan kegiatan monitoring penyakit ikan air laut pada sentra budi daya ikan dengan mengedepankan kerugian ekonomis yang dialami oleh pembudidaya ikan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran sampai dengan TW III pada Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji di BPKIL Serang saat ini masih terblokir.

IKSK 11. Sampel Survailan *Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji

Indikator Sampel *Survailan Anti Microbial Resistance* (AMR) yang diuji merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan

membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloxacin.

Tabel 18. Capaian Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	75	15	80	533,3	106,7

- Capaian Kinerja**

Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan pada judul dan cara pengukuran penilaian dari tahun 2024. Indikator Pengujian sampel Surveilans AMR untuk komoditas ikan air laut dilaksanakan di 4 UPT- DJPB yaitu di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok, dengan target indikator kinerja tahunan sebanyak 75 (sampel) dan pada triwulan III sudah terdapat realisasi pengujian sampel AMR sebanyak 80 sampel.

Tabel 19. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan III Tahun 2025 di 4 UPT-DJPB

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan II	Prosentase (%)
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	26	27	103,85
2	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	16	19	118,75
3	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	16	17	106,25
4	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	17	17	100
Total		75	80	106,67

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
	BBPBL Lampung	26	Kerapu	8	11

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
			Kakap	9	7
			Bawal	9	9
	BPBL Batam	16	Kerapu	5	6
			Kakap	8	9
			Bawal	3	4
	BPBL Lombok	16	Kakap	9	4
			Bawal	8	4
	BPBL Ambon	17	Kerapu	4	3
			Kakap	4	6
			Kuwe	9	8
Total				75	80

Kegiatan Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) ikan air laut dilaksanakan di 4 (empat) UPT – Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target total tahunan yang ditetapkan sebanyak 75 sampel. Realisasi yang dicapai adalah 80 sampel atau perolehan capaian sebesar 106,67%. Secara keseluruhan setiap UPT Ikan Laut sampel surveilans AMR telah melampaui target tahunan. Realisasi sampel surveilans AMR tertinggi dicapai oleh BPBL Batam yakni sebesar 118,75% atau sebanyak 19 sampel dari target 16 sampel. Namun demikian pada target komoditas, masih ada 2 UPT yang belum tercapai, yakni BPBL Lampung sampel AMR untuk jenis komoditas Kerapu yang baru mencapai 72,73% dan Kakap baru mencapai 77,78% dan BPBL Ambon sampel AMR untuk komoditas Kerapu baru mencapai 75%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji merupakan indikator kinerja yang mengalami perubahan cara pengukuran penilaian dari tahun 2024. Pada tahun 2024 pengukuran dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji telah dilaksanakan pengujian oleh BPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok sehingga terealisasi sebanyak 80 sampel yang telah diuji. Selanjutnya terkait dengan sampel yang telah diambil, maka sampel tersebut akan dilakukan identifikasi bakteri guna mendapatkan isolat bakteri target. Apabila hasil identifikasi bakteri ditemukan bakteri target, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian Antimicrobial Sensitivity Test (AST) dengan menggunakan metode agar disk difusi. Metode ini bertujuan untuk menentukan apakah bakteri target sensitif, intermediate atau resisten terhadap antibiotik yang digunakan dalam pengujian. Hasil pengujian resistensi antimikroba akan diketahui pada akhir tahun.

Kendala yang ada pada pencapaian Indikator tersebut pada triwulan III ini yaitu, 1) terdapat beberapa UPT yang anggaran sebelumnya terblokir dan baru diaktifkan pada

triwulan II, 2) tidak terdapat anggaran perjalanan dinas untuk melakukan pengambilan sampel AMR.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya yang diharapkan bisa dilaksanakan pada Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji, yaitu 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian sampel Surveilans AMR untuk komoditas ikan air laut dan melakukan maintenance untuk alat-alat pengujian di masing-masing laboratorium dan 2) Memaksimalkan anggaran yang ada untuk mendukung capaian target dari itu ini.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW III pada Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji di oleh masing masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 17.997.540,- (75%) dari pagu Rp. 23.839.000,-
- BPBL Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- (96,54%) dari pagu Rp. 15.538.000,-
- BPBL Batam sebesar Rp. 7.600.000,- (51,97%) dari pagu Rp. 14.624.000,-
- BPBL Lombok sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 14.624.000,-

Anggaran yang sudah terealisasi untuk Indikator Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji adalah sebesar Rp. 40.597.540,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 68.625.000,- atau mencapai 59,16% anggaran terserap.

IKSK 12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Diseminasi adalah penyebaran ide, gagasan dan sebagainya. Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah kegiatan pelatihan atau pembimbingan yang bersifat teknis dan praktis, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab tertentu.

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan Kegiatan yang dapat berupa Sosialisasi, Diseminasi dan Bimtek terkait kebijakan, program kerja, bantuan pemerintah, penerapan inovasi teknologi dan kompetensi dalam bidang Perikanan Budi Daya yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan tercapainya indikator kinerja tersebut diharapkan penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan baik, terimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 20. Capaian Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian Tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	11.000	-	-	-	-

Pada tabel diatas realisasi TW III pada Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya masih belum ada realisasi, karena pengukuran capaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan indikator baru pada Produksi pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan perbandingan nilai dengan tahun.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 11.000 (orang) yang telah disampaikan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek. Pada triwulan III capaian ini belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi progres untuk kegiatan ini tetap dilakukan yaitu melakukan penyiapan-penyiapan dokumen terkait dengan kebijakan perikanan budidaya.

Kendala atas rencana aksi pada indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya adalah anggaran yang masih diblokir.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rencana tindak lanjut terkait anggaran yaitu berkoordinasi dengan eselon I untuk pembukaan blokir anggaran jika memungkinkan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Sampai dengan TW III belum ada realisasi anggaran pada indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya karena anggaran masih dilakukan blokir.

IKSK 13. Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Klaster komoditas unggulan budidaya air laut berbasis kawasan merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berkaitan

dengan komoditas laut dalam suatu kawasan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing, efisiensi produksi, dan nilai tambah bagi komoditas budidaya laut tersebut. Kluster komoditas unggulan budidaya air laut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan menjadi komoditas ekspor. Pengembangan kluster budidaya laut dengan komoditas unggulan bertujuan meningkatkan produksi, efisiensi dan daya saing di pasar internasional.

Indikator Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan ini merupakan kegiatan Pembangunan Kluster komoditas unggulan ikan air laut berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh BLUPPB Karawang. Komoditas yang akan dikembangkan adalah kekerangan dengan membangun instalasi budi daya kekerangan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan sebagaimana pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	1	-	-	-	-

Sesuai pada tabel 21 dapat dilihat bahwa pada Triwulan III belum ada realisasi. Hal ini karena target tahunan terdapat pada Triwulan IV tahun 2025.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Tidak bisa dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya indikator Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Kluster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan target tahunan sebanyak 1 (unit) kluster yang sudah dibangun. Pada triwulan III capaian ini belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi progres untuk kegiatan ini tetap dilakukan yaitu melakukan penyiapan-penyiapan dokumen terkait dengan kebijakan perikanan budidaya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam pencapaian target pada Triwulan IV nanti adalah dengan melakukan inventarisasi kegiatan dan capaian progress Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan dengan BLUPPB Karawang.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 untuk pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang sebesar Rp1.619.193.225,- atau sebesar 16,19% dari pagu sebesar Rp10.000.000.000,- (belum dipotong efisiensi). Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang berasal dari rupiah murni (APBN) dan penerimaan BLU. Selain itu, kegiatan pembangunan klaster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan Satker BLUPPB Karawang mendapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp8.292.360.000,- (82,92%).

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima. Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 14. Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun

pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Tabel 22. Capaian Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	81,55	84	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84 (Nilai) dan pada Triwulan III indikator belum bisa dihitung dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024 dan 2025 diukur pada akhir tahun. Capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut tahun 2024 sebesar 81,55 % sedangkan pada triwulan III tahun 2025 ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan II, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain: Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku:

<https://kinerjaku.kkp.go.id/> sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

Kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target indikator ini adalah beberapa IKU yang menjadi target adalah kegiatan/pekerjaan dari beberapa UPT DJPB sehingga data sering harus menunggu untuk dikumpulkan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk triwulan selanjutnya adalah melakukan penyusunan dokumen kinerja lebih awal agar pengumpulan dokumen yang dilakukan setiap triwulan bisa tepat waktu dan dapat segera diupload dokumen tersebut ke aplikasi aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

IKSK 15. Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin.

- 1) Indikator dimensi **kualifikasi** yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- 2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi **kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:
 - a) Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b) Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan

- 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- 3) Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 4) Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

Tabel 23. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
0	84,18	81	0	0	0	0

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

• **Capaian Kinerja**

Triwulan III tahun 2025, realisasi Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut tidak terdapat realisasi karena pengukuran Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut ini dilakukan pada periode semesteran.

• **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Tahun Anggaran 2024 mencapai angka 84,18 pada Triwulan IV, yang sekaligus menjadi capaian tahunan. Angka ini mencerminkan tingkat profesionalitas ASN yang cukup tinggi di akhir tahun berjalan.

Sementara itu, capaian pada Tahun Anggaran 2025 Triwulan III belum terdapat capaian, Namun demikian, angka ini masih bersifat sementara karena belum mencakup kinerja hingga akhir tahun. Capaian tersebut merefleksikan posisi sementara yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui berbagai program penguatan kompetensi dan optimalisasi peran ASN di sisa waktu tahun berjalan.

• **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Dengan mempertimbangkan tren capaian tahunan sebelumnya, Satker Direktorat Ikan Air Laut menargetkan peningkatan kinerja ASN di semester kedua tahun

2025 agar capaian indeks profesionalitas mendekati atau melampaui tingkat yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Kendala atas rencana aksi untuk mencapai target adalah masih ada pegawai yang memiliki nilai IP ASN yang masih rendah.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Pegawai Direktorat Ikan Air Laut menargetkan peningkatan capaian kinerja pada Semester II dengan berfokus pada perbaikan nilai kinerja individu maupun unit kerja. Upaya tersebut akan didukung melalui peningkatan kompetensi pegawai, antara lain dengan mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja. Melalui langkah ini, diharapkan kinerja Direktorat Ikan Air Laut dapat terus meningkat secara berkelanjutan

IKSK 16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- Entitas yang diperiksa oleh BPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
- Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Pengelola keuangan negara melaporkan Penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Tabel 24. Capaian Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	100	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (%). Pada triwulan III capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penyelesaian temuan dan belum ada kendala atas rencana aksi ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya terhadap indikator kinerja ini adalah mengumpulkan data untuk penyelesaian temuan BPK yang ada di Satker Direktorat Ikan Air Laut.

IKSK 17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Ikan Air Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 25. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW II	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
100	92,68	85	85	100	117,6	117,6

- **Capaian Kinerja**

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Ikan Air Laut sampai dengan 30 September 2025 (Triwulan III Tahun 2025).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut tercatat sebesar 100%. Angka ini melampaui target triwulan maupun target tahunan sebesar 85, dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 117,6%. Capaian ini mencerminkan optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Pada tahun 2024, capaian realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut mencapai 92,68%. Sementara itu, pada triwulan III tahun 2024 dan capaian Triwulan III Tahun 2025, capaian realisasi tercatat sama yaitu sebesar masing-masing 100%. Capaian ini menunjukkan kinerja pada tahun 2024 dan 2025 tetap menunjukkan hasil yang positif karena telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 pada level unit kerja, Direktorat Ikan Air Laut mencatat capaian tindak lanjut sebesar 100%, yang nilai capaiannya cukup tinggi dibandingkan dengan 3 Direktorat lain di lingkup DJPB (Direktorat Rumput Laut, Direktorat Air Tawar dan Direktorat Prasarana dan Sarana) dan capaiannya sama dengan Direktorat Ikan Air Payau. Hal ini menunjukkan bahwa satker Direktorat Ikan Air Laut sudah optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Ikan Air Laut.

Tabel 26. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00
2	Direktorat Rumput Laut	94,59
3	Direktorat Ikan Air Tawar	97,91

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	97,91

• **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Upaya yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), yaitu rekomendasi pada triwulan selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan baik secara teknis maupun administrasi harus mengikuti dan sesuai dengan peraturan yang ada.

IKSK 18. Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari capaian rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 5 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur. Pengukuran dilakukan dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 85%
- Pengelolaan BMN = 85%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

$$\text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} = \frac{\text{jumlah pengukuran terhadap 5 aspek}}{\text{jumlah aspek yang diukur}}$$

Tabel 27. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
99,09	94,77	80	-	-	-	-

- **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut. Jumlah Pegawai Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang PNS, 4 (empat) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 5 (lima) orang PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada tahun 2025 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga.

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Ikan Air Laut mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2025. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat.

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Ikan Air Laut yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2025 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat.

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen:

- a) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- b) Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.
- c) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

- **Capaian Kinerja**

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja ini adalah 80 (%). Pada triwulan III capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada triwulan III tahun 2024 sudah terdapat capaian sebesar 99,09 % karena indikator ini dilakukan pengukuran setiap triwulan pada tahun 2024 sedangkan pada tahun 2025 pengukuran untuk indikator kinerja ini dilakukan di akhir tahun sehingga pada triwulan III tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dilakukan perbandingan, sedangkan pada tahun 2024 capaian indikator kinerja persentase layanan perkantoran tercapai sebesar 94,77%.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penilaian Kehadiran pegawai, Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN, Layanan tata usaha dan Pengelolaan SDM Aparatur dan belum terdapat kendala atas rencana aksi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut triwulan selanjutnya terhadap indikator kinerja ini adalah mengumpulkan data Kehadiran pegawai, Pengelolaan Keuangan Pengelolaan BMN, Layanan tata usaha dan Pengelolaan SDM Aparatur dan belum terdapat kendala atas rencana aksi hingga periode pengukuran nanti di akhir tahun.

IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul

musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Tabel 28. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	70	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut adalah 70 (nilai). Pada triwulan III capaian belum dapat dilakukan penghitungan, dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses penilaian oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan dan belum terdapat kendala dalam prosesnya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk triwulan selanjutnya adalah melakukan proses mendokumentasikan arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah dengan baik di Direktorat Ikan Air Laut dengan.

IKSK 20. Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian

organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Indikator Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tabel 29. Capaian Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2024		2025			% Capaian tahun 2025	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW III	Tahun	Tahunan	TW III	TW III	Terhadap Realisasi TW III	Terhadap target tahunan
-	-	65	-	-	-	-

- **Capaian Kinerja**

Target tahunan Indikator kinerja Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut adalah sebesar 65 (%) dan pada Triwulan III belum ada realisasi dikarenakan pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2025 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut masih dalam proses pembuatan draft SOP dan belum terdapat kendala dalam prosesnya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk triwulan selanjutnya adalah melanjutkan proses pembuatan draft SOP Direktorat Ikan Air Laut untuk penilaian di akhir tahu.

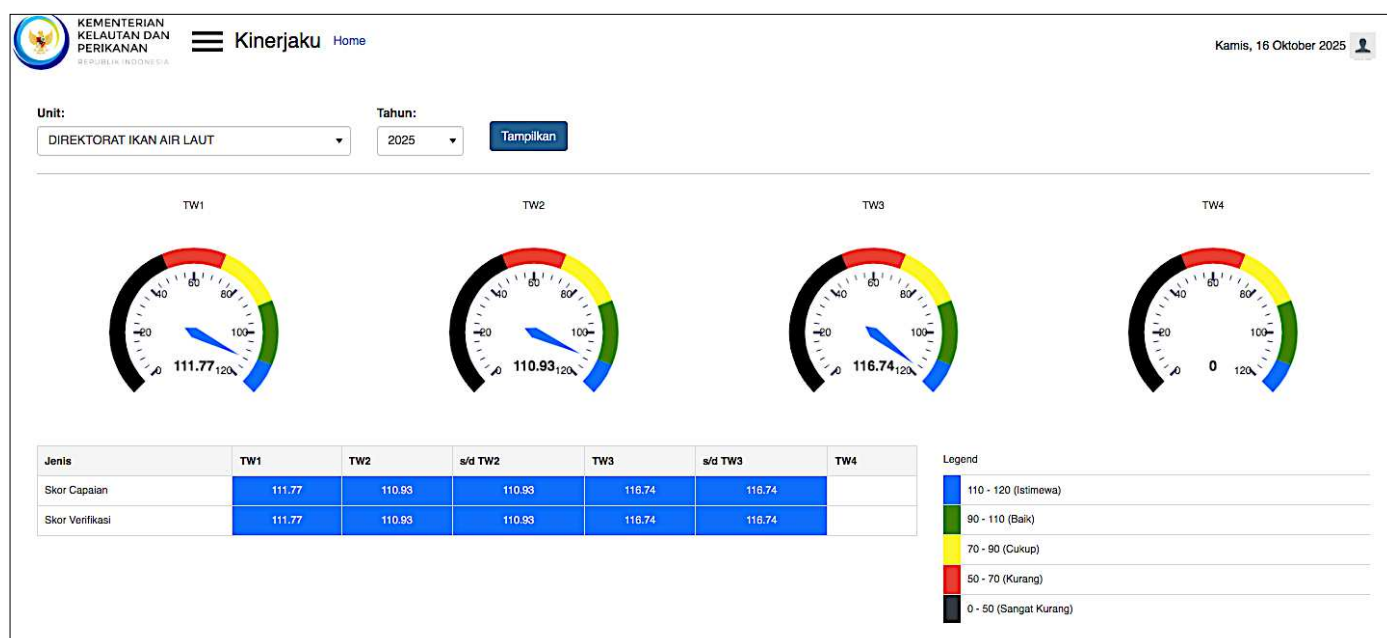
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Ikan Air Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Juli s.d September 2025. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target triwulan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pendukung sasaran kegiatan, sebanyak 9 (sembilan) Indikator Kinerja telah melampaui target triwulan yang telah ditetapkan atau >100% dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan III. Seluruh capaian Indikator kinerja Triwulan III Tahun 2025 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada Triwulan III mencapai nilai angka “Istimewa”



Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan III Tahun 2025

B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Ikan Air Laut merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait, sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan III Tahun 2025 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025, diketahui bahwa dari 20 (dua puluh) Indikator kinerja baru 9 (sembilan) Indikator kinerja yang dapat diukur pencapaiannya sedangkan capaian 11 indikator kinerja lainnya belum dapat diukur pada Triwulan III. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025 adalah Anggaran untuk beberapa IKU yang menjadi target masih diblokir sehingga kegiatan belum dapat dijalankan, diharapkan terus dapat dilakukan koordinasi dengan tim kerja Program dan perencanaan di eselon I terkait dengan proses pembukaan blokir anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Ikan Air Laut sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada Triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Kertas Kerja Verifikasi Triwulan III

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
Bulan : September - 2025
NKO Awal : 116.74
NKO Verifikasi : 116.74

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target September	Capaian September	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.10	Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	Rekomendasi	Maximize	6,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
2	IKSK.11	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji Data Dukung1	Sampel	Maximize	70,00	20,00	99,00	99,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
3	IKSK.12	Sampel Surveilans Anti Microbial Resistance (AMR) yang diuji Data Dukung1	Sampel	Maximize	75,00	15,00	80,00	80,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
4	IKSK.13	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	Orang	Maximize	11.000,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
5	IKSK.14	Klaster Komoditas Unggulan Air Laut Berbasis Kawasan	Unit	Maximize	1,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
6	IKSK.2	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT Data Dukung1	Ekor	Maximize	10.037,00	2.787,00	4.552,00	4.552,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
7	IKSK.3	Produksi Calon Induk Kepiting untuk operasional UPT	Ekor	Maximize	89,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
8	IKSK.4	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Data Dukung1	Ekor	Maximize	1.774.489,00	564.400,00	1.344.350,00	1.344.350,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
9	IKSK.5	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1	Ekor	Maximize	174.574,00	122.201,00	125.000,00	125.000,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
10	IKSK.6	Pakan Ikan Air Laut yang diproduksi untuk operasional UPT Data Dukung1	Kg	Maximize	13.927,00	4.000,00	4.170,00	4.170,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
11	IKSK.7	Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB)	Unit	Maximize	16,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
12	IKSK.8	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Data Dukung1	Sampel	Maximize	1.976,00	595,00	5.467,00	5.467,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
13	IKSK.9	Sampel pakan ikan air laut yang diuji Data Dukung1	Sampel	Maximize	17,00	5,00	25,00	25,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
14	IKSK.02.1	Nilai PM SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	Nilai	Maximize	84,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
15	IKSK.02.2	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut	Indeks	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan semesteran
16	IKSK.02.3	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
17	IKSK.02.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	85,00	85,00	100,00	100,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung
No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2025	Target September	Capaian September	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
18	IKSK.02.5	Persentase Layanan Perkantoran Satker Direktorat Ikan Air Laut	Persen	Maximize	80,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
19	IKSK.02.6	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut	Nilai	Maximize	70,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
20	IKSK.02.7	Persentase Penyelesaian SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut	Persen	Maximize	65,00	0,00		0,00	Valid	Pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
Kesimpulan										

Perwakilan Unit Kerja	Nama	Email	
	Aulia Sonida	tu.ditikanairlaut@gmail.com	Setuju
	Nur Amrina Rosidhah	tu.ditikanairlaut@gmail.com	Setuju
Tim Verifikasi	Nama	Email	
	Asrianti Eka Rahmadi	sakipdjpb@gmail.com	